

Laporan Keberlanjutan

Dana Pensiun Pos Indonesia Tahun 2025

2025

Profesional dan Melayani



Website

<https://www.dapenpos.co.id/>



dana pensiun pos indonesia

kantor : jl. tasikmalaya no. 1 bandung 40271
telp. 022-7271367 fax 022-7210828

Website : <http://dapenpos.co.id> E-mail : dapenpos_indonesia@yahoo.com

Bandung, 28 April 2026

Nomor : 651 -lap-15/ DOPMR-051/2026
Lampiran : 1 set
Perihal : Laporan Keberlanjutan Dapenpos Tahun 2025

Kepada Yth.
Kepala Direktorat Pengawasan
Lembaga Jasa Keuangan
Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat
Jl. Ir.H. Juanda No. 152
Bandung 40132

1. Menunjuk POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, terlampir kami sampaikan Laporan Keberlanjutan Dapenpos Tahun 2025.
2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**A.N. PENGURUS DAPENPOS,
DIREKTUR UTAMA,**

IWAN GUNAWAN

Tembusan:
Dewan Pengawas Dapenpos

LAPORAN KEBERLANJUTAN DANA PENSIUN POS INDONESIA TAHUN 2025

A. Strategi Keberlanjutan

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dan melihat manfaat keuangan berkelanjutan bagi setiap pihak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Dapenpos telah termotivasi untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, melalui berbagai jenis kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025 dan realisasi dari aksi tersebut yang tercantum dalam Laporan Keberlanjutan ini.

Berbagai strategi untuk merealisasikan rencana dan program kerja Dapenpos sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

Berbagai strategi dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Pensiun dengan sistem, struktur dan prosedur pengelolaan yang efisien, efektif, konsisten dan bertanggung jawab yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang serta Peraturan lain yang mengikat, yang dijadikan perangkat dalam Sistem Pengawasan maupun Pengendalian kinerja Dapenpos.

Pada tahun 2025, Pengurus terus berupaya meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi dana pensiun, antara lain pengawasan melalui audit internal dan pemantauan berkelanjutan atas temuan-temuan di setiap bidang. Dapenpos mengadakan pula kegiatan sosialisasi penerapan etika tata kelola yang baik melalui rapat koordinasi manajemen kepada seluruh insan Dapenpos.

Dapenpos berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) meliputi materi *ROPA (Records of Processing Activities)* yang diharapkan kegiatan sosialisasi sistem pengelolaan data tersebut terdapat menumbuhkan budaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi dana pensiun di antara insan Dapenpos dengan selalu menjaga kerahasiaan data peserta Dapenpos dan menaati prosedur permintaan seluruh data.

Implementasi pengelolaan dana pensiun berdasarkan Rencana Bisnis dengan praktik yang sehat dan beretika merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian *stakeholders* dalam mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan pengelolaan dana pensiun.

Tahun 2025 adalah tahun stabilisasi dan kehati-hatian bagi perekonomian Indonesia. Meski angka makro terlihat positif, risiko global, tekanan geopolitik dan kebijakan fiskal Trumps membuat pemerintah dan pelaku pasar harus lebih cermat dalam melakukan transaksi penempatan dan penjualan portofolio Investasi. Bagi lembaga seperti dana pensiun, tahun ini menuntut strategi investasi yang lebih diversifikasi, defensif, dan adaptif terhadap

dinamika pasar di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik, termasuk potensi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Namun, secara umum stabilitas ekonomi terjaga berkat cadangan devisa yang kuat, kebijakan fiskal yang prudent, dan investasi yang terus meningkat.

Pada tahun 2025 Dapenpos berhasil mencapai *Return on Investment* (ROI) sebesar 9,18 % dari target Rencana Bisnis sebesar 8,02% atau rasio pencapaian 114,52%. Pencapaian *Return on Asset* (ROA) sebesar 8.14% dari target sebesar 7.69% atau tercapai 105.85%

Langkah-langkah perbaikan & strategi yang ditempuh untuk memperbaiki pencapaian kinerja investasi antara lain:

1. **Evaluasi ulang strategi alokasi aset** untuk memastikan distribusi yang lebih tepat antara aset berisiko dan aman. Proses ini telah dirangkum dalam pembuatan Pedoman Penyusunan Rencana Investasi Dapenpos.
2. **Peningkatan manajemen risiko** dengan melibatkan lebih banyak analisis pasar dan skenario risiko dalam perencanaan investasi beserta kajian yang komprehensif berikut pemantauan instrumen investasi melalui penilaian *risk scoring analysis* dan *risk mapping* melalui aplikasi investasi dan aplikasi manajemen risiko.
3. **Peningkatan efisiensi biaya** dengan mengurangi pengeluaran operasional yang tidak perlu dan meminimalkan biaya transaksi.
4. **Penyusunan sistem pengambilan keputusan yang lebih responsif**, untuk bisa lebih cepat merespons perubahan pasar dan kondisi ekonomi.
5. **Komunikasi dan eskalasi lebih intens dalam realisasi luran Tambahan dari Pendiri** yang dalam kondisi tersendat sejak bulan April 2025 hingga Desember 2025.

Dalam pengelolaan investasi saham, dalam prinsip manajemen risiko, salah satu instrumen penting adalah **strategi cut loss**, yaitu tindakan menjual saham yang mengalami penurunan harga hingga mencapai batas tertentu guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Proses *cut loss* di Dapenpos mekanismenya melalui persetujuan dari Dewan Pengawas terlebih dahulu apabila nilainya sudah menurun diatas 50%, yang dituangkan melalui revisi aturan Pengurus Nomor: 31/SK/DIRUT/0825 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Investasi Bab IV butir A Kebijakan Cutloss.

Adapun pembelian obligasi BSI berkelanjutan keberlanjutan sebagaimana tercantum dalam RAKB Dapenpos belum dapat diwujudkan di Tahun 2025 mengingat yield yang didapat belum sesuai dengan target yang diharapkan.

B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

a. Aspek Ekonomi

1) Laporan Hasil Usaha Tahun 2023, 2024 dan 2025

**DANA PENSUN POS INDONESIA
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN HASIL USAHA**

Periode : 31 Desember 2025 (Audit) , 2024, 2023

(Dalam Satuan Rupiah)

URAIAN	S/d.31 Desember 2025	S/d.31 Desember 2024	S/d.31 Desember 2023
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga	131.928.944.765	132.705.228.122	126.581.243.708
Deviden	4.136.512.043	2.773.977.021	1.339.113.474
Sewa	1.925.400.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	3.396.622.724	480.383.651	(947.371.746)
Pendapatan Investasi Lainnya	75.057.090	31.381.096	85.581.096
Total Pendapatan Investasi	141.462.536.622	136.990.969.890	128.058.566.532
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi	2.101.000	-	10.430.404
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	92.807.055	290.963.635	158.871.000
Beban Penyusutan	14.749.999	14.750.025	14.750.004
Beban Manajer Investasi	-	-	-
Beban Investasi Lainnya	1.261.335.823	1.331.978.368	1.275.361.695
Total Beban Investasi	1.370.993.877	1.637.692.028	1.459.413.103
HASIL USAHA INVESTASI	140.091.542.745	135.353.277.862	126.599.153.429
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Personalia	7.848.658.711	7.149.317.720	7.867.473.417
Beban Kantor	880.001.565	779.838.537	896.042.762
Beban Pemeliharaan	-	-	-
Beban Penyusutan	186.568.390	244.761.956	258.790.941
Beban Jasa Pihak Ketiga	471.450.519	334.339.757	320.164.300
Beban Operasional Lainnya	1.733.129.673	2.210.713.330	2.272.659.889
Total Beban Operasional	11.119.808.858	10.718.971.300	11.615.131.309
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan luran	-	451.243.493	-
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional	142.489.000	-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain	-	-	-
Pendapatan Lain-lain Diluar Investasi	19.111.001	35.507.117	129.745.638
Beban Lainnya Diluar Investasi	(8.223.228.554)	(137.773.422)	(977.375.293)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(8.061.628.553)	348.977.188	(847.629.655)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	120.910.105.334	124.983.283.750	114.136.392.465
PAJAK PENGHASILAN	46.835.800	105.813.620	20.310.840
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	120.863.269.534	124.877.470.130	114.116.081.625

DANA PENSIUN POS INDONESIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Periode : 31 Desember 2025 (Audit), 2024 & 2023

(Dalam Satuan Rupiah)

URAIAN	S/d.31 Desember 2025	S/d.31 Desember 2024	S/d.31 Desember 2023
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga	133.509.906.737	134.119.703.139	122.199.843.511
Penerimaan Deviden	4.294.495.597	1.050.326.286	1.339.113.474
Penerimaan Sewa	2.085.400.000	1.501.500.000	330.000.000
Pendapatan Investasi Lain	-	-	-
Pelepasan Investasi	1.236.505.072.652	964.457.274.000	810.906.986.128
Penanaman Investasi	(1.188.530.788.600)	(1.036.713.234.400)	(929.565.313.000)
Pembayaran Beban Investasi	(1.651.943.923)	(1.641.761.769)	(1.018.368.328)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	186.212.142.463	62.773.807.256	4.192.261.785
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional	(10.418.344.408)	(10.870.586.183)	(10.529.227.587)
Penjualan Aktiva Operasional	-	-	-
Pembelian Aktiva Operasional	(82.160.000)	(16.030.000)	(67.568.150)
Penj/Pemb Aktiva Lain - lain	(58.600.000)	(282.817.613)	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	155.519.509	26.405.567	246.065.420
Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional	(22.990.051)	(37.068.752)	(49.062.049)
Pajak Penghasilan	(205.294.084)	(15.000.000)	(113.030.352)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(10.631.869.034)	(11.195.096.981)	(10.512.822.718)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	17.154.152.127	28.736.968.969	41.461.788.526
Penerimaan Iuran Normal Peserta	3.514.528.950	4.469.147.079	5.332.982.958
Penerimaan Iuran Tambahan	91.247.089.525	198.653.524.615	199.409.144.925
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	-	-	-
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	-	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	-	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(287.530.132.963)	(283.448.646.191)	(239.843.755.804)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(175.614.362.361)	(51.589.005.528)	6.360.160.605
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK BERSIH	(34.088.932)	(10.295.253)	39.599.672
KAS DAN BANK AWAL PERIODE LAPORAN	60.407.182	70.702.435	31.102.763
KAS DAN BANK AHIR PERIODE LAPORAN	26.318.250	60.407.182	70.702.435

3) Produk Ramah Lingkungan

a. Program peningkatan Kompetensi SDM Melalui Edukasi lingkungan hijau

Untuk mewujudkan kantor hijau beberapa langkah-langkah telah dilakukan antara lain program kerja berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas kantor dan lingkungan sekitarnya melalui pembuatan taman baru dan pemeliharaan tanaman di sekeliling kantor Dapenpos, pengembangan sistem pendukung yang ramah lingkungan melalui pemakaian tumbler untuk masing-masing karyawan, pemisahan sampah organik dan sampah non organik. Penghijauan dan lingkungan bersih tidak hanya sekedar menanam pohon saja, namun dengan membersihkan setiap ruangan dan lingkungan sekitar kantor serta membuang sampah pada tempatnya. Salah satu cara dengan menyediakan tong sampah disetiap ruangan kantor dan lingkungan kantor. Kantor yang sehat memiliki beberapa standar yang dapat dikatakan kantor sehat, antara lain memiliki lingkungan yang bersih, indah, tertib, rindang, dan memiliki berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi, Dapenpos memiliki tempat pembuangan sampah yang memadai dan representatif, dan sudah terdapat saluran air yang bersih dan lancar.

Sebagai bagian dari upaya memotivasi penerapan pola hidup bersih dan rapi, dalam suatu kesempatan kegiatan kantor, diberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki ruang kerja bersih dan rapi. Sistem Evaluasi Pelaksanaan program dilakukan melalui monitoring/pemantauan secara berkala atas perilaku edukasi lingkungan hijau tersebut yang dinilai ke dalam kinerja individu.

b. Program Ramah Lingkungan Melalui Penggunaan *Tumbler* Isi Ulang Pada Setiap Kegiatan Dapenpos

Penggunaan tumbler menjadi keharusan agar lingkungan kantor tetap bersih dan tidak membawa dampak negatif. Penggunaan tumbler di kantor memiliki banyak manfaat, baik untuk lingkungan maupun bagi individu. Dengan memiliki tumbler sendiri, setiap karyawan dapat mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, menghemat pengeluaran, dan menjaga kesehatan dengan minuman yang lebih aman. Selain itu, tumbler juga dapat menjaga suhu minuman tetap panas atau dingin lebih lama, menjadikannya pilihan yang praktis dan fleksibel.

Menggunakan *tumbler* bukan hanya tentang membawa wadah minum, tetapi juga tentang memulai perubahan kecil yang memiliki dampak besar bagi lingkungan, kesehatan, dan gaya hidup. Dengan tumbler, kita membantu mengurangi sampah plastik, menghemat uang, menjaga kesehatan, dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dengan *tumbler*, kita bisa lebih melakukan kontrol terhadap apa yang kita minum. Kita bisa minum sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Menggunakan *tumbler* yang terbuat dari bahan aman dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya seperti yang terkadang ada dalam plastik, sehingga lebih aman untuk kesehatan. Beberapa manfaat penggunaan tumbler di kantor adalah mengurangi sampah plastik yang dihasilkan, baik dari botol air mineral maupun gelas plastik sekali pakai, hemat pengeluaran, dimana karyawan tidak perlu membeli minuman kemasan setiap hari serta menjaga kesehatan dan kebersihan minuman dan

mencegah kontaminasi, sehingga memungkinkan pengguna untuk memilih minuman sehat tanpa khawatir.

Melalui penggunaan *tumbler*, diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh kantor dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan oleh karyawan Dapenpos. Dengan memiliki tumbler yang tepat dan menggunakannya secara rutin, karyawan dapat berkontribusi pada upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup di kantor.

Dapenpos telah menerapkan penggunaan tumbler untuk berbagai kegiatan karyawan, seperti digunakan pada saat olah raga bersama, kegiatan rapat internal, dll sehingga meminimalisir penggunaan air minum dalam kemasan (AMDK). Pembelian AMDK hanya diperuntukkan untuk tamu Dapenpos, baik pensiunan maupun mitra. Ke depan, secara bertahap tidak lagi disediakan air kemasan pada setiap kegiatan Dapenpos.





Kegiatan karyawan pada saat rapat koordinasi manajemen yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2025.

b. Aspek Lingkungan Hidup.

Pengembangan pola perilaku efisiensi karyawan di kantor telah dilakukan melalui Surat Edaran Nomor: 05/SE/DIRUT/0624 tentang Program Efisiensi Dapenpos diantaranya penggunaan listrik dan air sehemat mungkin, dengan mematkannya pada saat tidak digunakan, penggunaan AC pada suhu optimal 23–26 derajat celcius. Secara berkala, pada saat jam pulang kantor, Satuan Pengamanan Dapenpos bertugas memantau dan mengawasi penggunaan listrik dan AC di setiap ruangan karyawan, dan memastikan kondisi listrik dan AC dalam keadaan mati.

Dapenpos turut serta berupaya memelihara kesehatan karyawan dan memberikan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan berolah raga bersama di Taman Hutan Raya Bandung. Dengan berolah raga di hutan raya, individu dan masyarakat dapat membantu mengawasi dan menjaga hutan dari kegiatan ilegal, seperti penebangan liar. Hutan raya dapat membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga berolah raga di sana dapat meningkatkan kualitas udara.



c. Aspek Sosial

Dampak positif dari penanaman pohon di halaman kantor Dapenpos, suasana jalan menjadi lebih asri, membawa kesejukan bagi lingkungan masyarakat sekitar kantor Dapenpos. Secara berkala pohon cemara dirapikan dan dibersihkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan terhadap kendaraan pengguna jalan maupun pejalan kaki.

Untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar, setiap kegiatan senam pagi, Dapenpos melibatkan para ibu yang tinggal di wilayah sekitar kantor Dapenpos untuk mengikuti senam bersama bertempat di halaman kantor Dapenpos.



C. Profil Dapenpos

Dana Pensiun Pos Indonesia adalah suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Berdasarkan jenisnya, Dapenpos termasuk dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

Sebagai suatu Badan Usaha, Dana Pensiun tidak terlepas dari tugas-tugas mengelola sumber-sumber daya yang dikuasai untuk mendapatkan hasil yang optimal sehingga pada gilirannya para peserta mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Konsekuensi logis dari hal ini sesuai dengan tujuan Dapenpos yang harus beroperasi secara efisien, efektif dan konsisten dalam arti bahwa berbagai sumber daya didayagunakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kinerja yang optimal yang didukung oleh transformasi teknologi yang efektif.

Dana Pensiun Pos Indonesia adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menjamin serta memelihara kesinambungan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta dan menunjang kepentingan Pendiri, Karyawan dan Pemangku kepentingan lainnya.

Dana Pensiun Pos Indonesia pertama kali didirikan dalam bentuk Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum Pos dan Giro yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, Sarjana Hukum, Nomor 212 tanggal 23 Juli 1988, dan dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.44/KU.101/NTPT-88 tanggal 12 Juli 1988 tentang Pembentukan dan Pendirian Badan Pengelola Dana Pensiun/Jaminan Hari Tua Pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro.

Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum Pos dan Giro telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan RI Berdasarkan surat Nomor: S-721/KM.13/1988 tanggal 26 September 1988, kemudian disesuaikan dengan Undang-undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya, dengan nama Dana Pensiun PT Pos Indonesia (Persero).

Dana Pensiun PT. Pos Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud diatas disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusan Nomor Kep-397/KMK.17/1998 tanggal 27 Juli 1998 dan dimulai pada Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Oktober 1998 Nomor 85 kemudian berubah namanya menjadi Dana Pensiun Pos Indonesia yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-113/KMK.17/2000 tanggal 3 April 2000 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pos Indonesia yang dimuat pada Tambahan Berita Negara RI tanggal 28 April 2000 Nomor 34.

Peraturan Dana Pensiun Pos Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.167/DIRUT/1217 tanggal 22 Desember 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pos Indonesia dan telah mendapat pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Rencana Bisnis Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-867/NB.11/2018 tanggal 24 September 2018 dan diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 04.01 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 46 tanggal 7/6-2019.

C.1. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja Terbaik dan Terpercaya yang mampu memberikan kesinambungan pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta, dan menunjang kepentingan Pendiri, Karyawan dan Pemangku Kepentingan

Misi

1. Mengelola Pembayaran Manfaat Pensiun secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima.
2. Mengelola dana secara Profesional dengan tingkat resiko terukur dalam upaya menjaga kesinambungan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta dan membantu meringankan kewajiban Pendiri.
3. Turut serta membangun semangat kerja dan ikatan yang lestari diantara Peserta.

C.2. INFORMASI DANA PENSIUN POS INDONESIA

Nama Dana Pensiun	DANA PENSIUN POS INDONESIA
Tanggal Pendirian	23 Juli 1988
Dasar Hukum Pendirian	Akta Notaris Wiratni Ahmadi, Sarjana Hukum, Nomor 212 tanggal 23 Juli 1988, dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.44/KU.101/NTPT-88 tanggal 12 Juli 1988 tentang Pembentukan dan Pendirian Badan Pengelola Dana Pensiun/Jaminan Hari Tua Pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan RI Berdasarkan Rencana Bisnis surat nomor: S-721/KM.13/1988 tanggal 26 September 1988.
Dasar Hukum Penyesuaian dengan Undang-Undang Dana Pensiun	Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 52/Dirut/1998 tanggal 13 April 1998 dan disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusan Nomor Kep-397/KMK.17/1998 tanggal 27 Juli 1998.
Bidang Usaha	Dana Pensiun Pemberi Kerja Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti
Badan Hukum	Dana Pensiun
Jumlah Karyawan	21 Karyawan per 31 Desember 2025
Kantor	Alamat : Jalan Tasikmalaya No. 1 Bandung 40271 No. Telepon : 022-7271367 Email : dapenpos_indonesia@yahoo.com Website : http://www.dapenpos.co.id

C.3. BIDANG USAHA

Dana Pensiun Pos Indonesia merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan mengelola dan mengembangkan dana yang disetor oleh Peserta Dana Pensiun dan Pemberi Kerja yang menjadi Pendiri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, Peraturan OJK Nomor 35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun dan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.21/Dirut/0221 tanggal 1 Februari 2021 tentang Arah Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia.

a). Total aset dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah)

DANA PENSIUN POS INDONESIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN AKTIVA BERSIH
Per : 31 Desember 2025 (Audit), 2024 & 2023

(Dalam Satuan Rupiah)

URAIAN	S/d.31 Desember 2025	S/d.31 Desember 2024	S/d.31 Desember 2023
AKTIVA			
INVESTASI (Nilai Wajar)			
Deposito On Call	-	-	1.214.000.000
Deposito Berjangka Rupiah	279.101.000.000	253.769.000.000	236.764.000.000
Sertifikat Deposito	-	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-
Saham	26.910.570.100	24.635.576.100	28.016.295.000
Obligasi	212.735.379.512	303.248.810.490	522.327.433.070
Reksadana	-	1.933.371.586	1.986.640.010
Surat Berharga Pemerintah	1.302.623.443.269	1.236.084.644.402	991.998.387.486
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-	-
Penempatan Langsung	142.644.000.000	142.644.000.000	139.276.000.000
Surat Pengakuan Utang	-	-	-
Tanah	-	-	-
Bangunan	-	-	-
Tanah & Bangunan	130.636.000.000	130.636.000.000	130.178.000.000
Total Investasi	2.094.650.392.881	2.092.951.402.578	2.051.760.755.566
AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI			
Kas & Bank	26.318.250	60.407.182	70.702.435
Piutang Iuran	-	-	-
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.790.577.605	4.278.071.859	3.055.973.845
Iuran Normal Peserta	6.352.814	7.056.518	2.981.340
Iuran Tambahan	226.120.132.749	36.498.835.810	16.159.345.565
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	5.024.971.347	451.243.493	-
Beban Dibayar Dimuka	20.871.687.340	19.371.227.254	17.545.121.037
Piutang Investasi	-	-	-
Piutang Hasil Investasi	30.867.692.382	32.712.823.652	27.405.037.838
Piutang Lain-lain	262.199.500	-	-
Total Aktiva Lancar Di Luar Investasi	287.969.931.987	93.379.665.768	64.239.162.060
AKTIVA OPERASIONAL			
Tanah & Bangunan (Nilai Buku)	1.359.909.400	1.493.963.300	1.579.975.896
Kendaraan (Nilai Buku)	2	4	61.661.497
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	94.615.276	51.087.599	70.982.988
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	11.905.683	15.078.575	21.512.557
Aktiva Operasional Lainnya (Nilai Buku)	15.976.733	26.686.006	35.478.607
Total Aktiva Operasional	1.482.407.094	1.586.815.484	1.769.611.545
AKTIVA LAIN - LAIN	185.191.640	240.863.217	-
AKTIVA TERSEDIA	2.384.287.923.602	2.188.158.747.047	2.117.769.529.171
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA			
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	50.777.000	15.441.800	-
Hutang Investasi	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.424.428.093	1.226.799.394	2.140.094.369
Kewajiban Diluar Kewajiban Aktuarial	1.985.637.413	1.803.771.184	1.379.041.797
Total Kewajiban Di Luar Kewajiban Aktuarial	3.460.842.506	3.046.012.378	3.519.136.166
AKTIVA BERSIH	2.380.827.081.096	2.185.112.734.669	2.114.250.393.005

b). Jumlah karyawan

PROFIL PENGELOLA

o Dewan Pengawas	: 3 Orang	o Direktur Utama	: 1 Orang
o Staf Dewan Pengawas	: 1 Orang	o Direktur Operasi	: 1 Orang
Jumlah	: 4 Orang	o Kepala Bidang	: 4 Orang
		o Kepala Seksi	: 7 Orang
		o Fungsional & Staf	: 10 Orang
		Jumlah	: 23 Orang

Karyawan Dapenpos Posisi Per 31 Desember 2025

No	Pendidikan	Jenis Kelamin	Level Jabatan	Usia	Status Karyawan
1	S1	Perempuan	Kabid	54	Karyawan Tetap
2	SLTA	Perempuan	Kasi	55	Karyawan Tetap
3	D3	Perempuan	Kabid	55	Karyawan Tetap
4	S1	Perempuan	Kabid	53	Karyawan Tetap
5	S1	Laki-laki	Kasi	55	Karyawan Tetap
6	SLTA	Perempuan	Kasi	56	Karyawan Tetap
7	SLTA	Laki-laki	Fungsional	55	Karyawan Tetap
8	D3	Perempuan	Kasi	56	Karyawan Tetap
9	S1	Perempuan	Kasi	55	Karyawan Tetap
10	SLTA	Laki-laki	Fungsional	53	Karyawan Tetap
11	SLTP	Laki-laki	Staf	51	Karyawan Tetap
12	D3	Laki-laki	Kabid	56	Karyawan Tetap
13	S1	Laki-laki	Kasi	53	Karyawan Tetap
14	SLTP	Laki-laki	Staf	54	Karyawan Tetap
15	SLTA	Perempuan	Staf	43	Karyawan Tetap
16	S1	Perempuan	Kasi	55	Karyawan Tetap
17	S1	Laki-laki	Fungsional	48	Karyawan Tetap
18	S1	Perempuan	Fungsional	42	Karyawan Tetap
19	S1	Perempuan	Fungsional	38	Karyawan Tetap
20	S1	Laki-laki	Fungsional	39	Karyawan Tetap
21	S1	Perempuan	Fungsional	42	Karyawan Tetap

c) Dapenpos didirikan oleh PT Pos Indonesia dan merupakan badan afiliasi dari PT Pos Indonesia.

d) Wilayah operasional pengelolaan Dapenpos hanya di Jl. Tasikmalaya No. 1 Bandung 40271.

D. Pengelolaan Investasi

Kebijakan Umum

Kegiatan investasi merupakan sumber penghasilan yang krusial bagi dana pensiun untuk dapat memenuhi kewajiban dana pensiun kepada peserta, terutama untuk melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada seluruh Peserta sebagai Penerima Manfaat Pensiun. Untuk memberikan keleluasaan yang memadai bagi dana pensiun dalam melakukan investasi di tengah perkembangan instrumen investasi pada sektor pasar uang, pasar modal, serta sektor riil, Pemerintah Indonesia melalui OJK, telah menetapkan berbagai kebijakan sehubungan dengan pengelolaan investasi untuk menunjang keberhasilan dana pensiun dalam melakukan pengelolaan investasi tersebut.

Adapun kebijakan terkait dengan pengelolaan investasi Dana Pensiun tersebut digariskan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
3. Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun pada Bab IX Pasal 150 sampai dengan Pasal 170.
4. Peraturan OJK Nomor 35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun.
5. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan POJK Nomor 56/POJK.05/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun.

E. Keanggotaan pada Asosiasi.

Dapenpos merupakan anggota dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI). Organisasi ADPI didirikan pada 27 Agustus 1985 dan telah memiliki lebih dari 168 anggota Dana Pensiun yang tersebar di seluruh Indonesia. Dapenpos selalu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan ADPI, baik dalam rangka HUT ADPI maupun berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh ADPI serta ikut berperan dalam mengembangkan industri dana pensiun di Indonesia melalui ADPI Komda Jabar.

F. Kebijakan Terhadap Pemenuhan Strategi Berkelanjutan

1. Komitmen Penerapan Keuangan Berkelanjutan

a) Pengembangan Kualitas SDM

Dapenpos telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai penyediaan pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM, khususnya untuk Dewan Pengawas, Pengurus dan Karyawan, baik secara *online* maupun *offline*. Pelatihan ADPI dan berbagai webinar dari OJK, PT Posind, PT Edvisor, Investpro maupun Lembaga berkompeten lainnya diikuti oleh karyawan dari bidang terkait sebagai bagian dari pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Dengan melakukan pengembangan kualitas SDM, Dapenpos berupaya

meningkatkan kinerja dan produktivitas SDM, serta meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

b) Peningkatan Pengawasan Atas Pengendalian Internal

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pensiun, Dapenpos telah melakukan peningkatan tata kelola dana pensiun melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif melalui Audit Internal di setiap bidang sesuai dengan *time line* dalam Program Kerja Audit Internal (PKAT) tahun 2025 dan secara berkala melakukan monitoring atas tindak lanjut temuan audit internal.

c) Digitalisasi Arsip

Dapenpos telah melakukan digitalisasi arsip peserta pasif yaitu proses mengubah dokumen fisik menjadi format digital untuk memudahkan pengelolaan, penyimpanan, dan akses informasi. Hal ini dilakukan dalam upaya:

- a. Peningkatan Efisiensi: Mengurangi waktu pencarian dan pengelolaan dokumen fisik.
- b. Penghematan Ruang: Mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik kantor Dapenpos.
- c. Akses Mudah: Memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi melalui digital.
- d. Keamanan: Mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik.

Dengan digitalisasi arsip, Dapenpos dapat meningkatkan efisiensi, menghemat ruang, dan meningkatkan akses ke informasi.

d) Penggunaan sumber daya secara efisien.

Dengan menggunakan sumber daya yang efisien, diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan, menghemat biaya, dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satu upaya lain adalah mengurangi penggunaan kertas / *paperless* dengan menggunakan dokumen digital berupa NDE (Nota Dinas Elektronik) yang digunakan untuk berkorespondensi dengan PT Pos Indonesia (Persero), anak perusahaan berikut badan afiliasinya dan hanya naskah-naskah tertentu yang harus dicetak. Mengatur Penggunaan Energi: Mengatur penggunaan energi dengan mematikan peralatan yang tidak digunakan dan menggunakan peralatan hemat energi.

2. Tantangan Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Berbagai tantangan penerapan keuangan berkelanjutan pada tahun 2025 terdiri dari:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman. Masih terdapat ketidakpahaman terhadap konsep keuangan berkelanjutan dan manfaatnya. Hal ini disebabkan karena minimnya literasi dan rencana keuangan berkelanjutan merupakan hal baru khususnya bagi dana pensiun.
- b. Keterbatasan data dan informasi. Kurangnya data dan informasi yang akurat dan terkini tentang keuangan berkelanjutan yang dapat menghambat pengambilan keputusan.
- c. Biaya Implementasi. Implementasi keuangan berkelanjutan memerlukan biaya yang signifikan, seperti investasi dalam teknologi dan biaya pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawan, di tengah semangat efisiensi di semua bidang.
- d. Ketergantungan pada Sumber Daya. Keuangan berkelanjutan seringkali bergantung pada sumber daya yang terbatas, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
- e. Kondisi ekonomi global, dan geopolitik merupakan faktor yang mempengaruhi iklim investasi Dana Pensiun.

- f. Perubahan Perilaku. Keuangan berkelanjutan memerlukan perubahan perilaku dan budaya organisasi, yang agak sulit untuk diimplementasikan karena memerlukan transformasi / proses waktu yang panjang untuk merubah sifat dan perilaku.
- g. Regulasi dan Kebijakan. Kurangnya regulasi dan kebijakan yang mendukung keuangan berkelanjutan dapat menghambat implementasinya.
- h. Pengukuran dan Evaluasi. Mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan berkelanjutan agak sulit karena kompleksitas dan variabilitas indikator yang digunakan.

3. Strategi Pencapaian Target.

- a. Menentukan Tujuan yang Jelas: Menentukan tujuan yang spesifik, dapat diukur, dan dapat dicapai, yang tertuang dalam RAKB Dapenpos 2025.
- b. Membuat Rencana Aksi: Membuat rencana aksi yang terperinci dan realistis untuk mencapai tujuan.
Dapenpos telah melakukan aksi atas rencana keuangan berkelanjutan yang telah dibuat melalui pengadaan tumbler untuk masing-masing karyawan serta edukasi lingkungan hijau ke Taman Hutan Raya Djuanda dan Taman Hutan Babakan Siliwangi Bandung.
- c. Menggunakan Sumber Daya yang Efektif. Dapenpos telah menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.
- d. Mengawasi dan Mengevaluasi: Mengawasi dan mengevaluasi kemajuan secara teratur untuk memastikan bahwa target tercapai. Setiap rapat koordinasi manajemen untuk seluruh karyawan tidak disediakan lagi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), dengan mengoptimalkan penggunaan tumbler.
- e. Menggunakan Teknologi: Dapenpos telah menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui digitalisasi arsip dan implementasi system aplikasi yaitu SIM Pengarsipan, SIM SDM, SIM Absensi, SIM Inventaris, SIM ITJobs, APIKDA Dapenpos.
- f. Mengelola Risiko: Mengelola risiko yang mungkin timbul dan memiliki rencana kontinjensi. Dapenpos telah memiliki system aplikasi investasi dan manajemen risiko untuk mengukur dan menilai risiko setiap penempatan dan pelepasan investasi melalui *risk scoring* dan *risk mapping*.
- g. Mempertahankan Motivasi: Mempertahankan motivasi dan semangat untuk mencapai target merupakan hal penting dalam menjaga semangat kerja karyawan.
- h. Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keuangan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan berkelanjutan dan mencapai tujuan keberlanjutan.

G. Tata Kelola Keberlanjutan

Merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia telah menerbitkan Arahan Investasi dengan Keputusan Nomor: KD.021/DIRUT/0221 tanggal 1 Februari 2021 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia. Arahan Investasi merupakan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia untuk melaksanakan investasi dana pensiun secara optimal dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat keamanan, tingkat risiko investasi. Selain itu, Arahan Investasi juga merumuskan garis besar kebijakan investasi Dana Pensiun Pos Indonesia, seperti jenis investasi, batas maksimum untuk setiap jenis

investasi, sasaran hasil investasi, strategi alokasi aset, dan obyek investasi yang dilarang. Dengan adanya Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 dan Peraturan OJK Nomor 27 tahun 2023 dan aturan terkait lainnya, saat ini Arahan Investasi Dapenpos sudah disesuaikan dan dalam proses pengesahan di Pendiri.

Struktur Organisasi Dapenpos melalui Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD 128/DIRUT/1221 tanggal 31 Desember 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dapenpos dan Surat Keputusan Pengurus Nomor 25/SK/DIRUT/0524 tanggal 31 Mei 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dapenpos Organ di Bawah Kepala Bidang telah jelas menggambarkan uraian tugas pokok dan fungsi Pengurus dan Karyawan Dapenpos.

Organisasi Dapenpos terdiri dari 1 Direktorat dan 5 bidang yaitu Direktur Utama membawahi Direktorat Operasi dan bidang-bidang yaitu Bidang Investasi dan bidang Sekretariat & Umum, sementara Direktorat Operasi membawahi bidang-bidang yaitu bidang Manajemen Risiko & Kepatuhan, bidang Keuangan dan bidang Kepesertaan.

Dapenpos telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan untuk Dewan Pengawas, Pengurus dan Karyawan, baik secara *online* maupun *offline*. Dapenpos telah berupaya memenuhi Peraturan OJK Nomor 34 tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengembangan Kualitas SDM bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun dengan meningkatkan nominal penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sebesar 1,75% untuk periode Juni sampai dengan Desember 2025 melalui penyesuaian anggaran diklat dalam Rencana Bisnis Dapenpos menjadi sebesar Rp127.042.636,00

H. Kinerja Keberlanjutan

Kinerja berkelanjutan Dapenpos adalah kemampuan dan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai aset Dapenpos dalam jangka panjang, sehingga dapat memenuhi kewajiban pembayaran pensiun kepada peserta sampai kepada peserta terakhir.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja berkelanjutan Dapenpos adalah:

1. Biaya yang efisien: Dapenpos berupaya melakukan efisiensi dalam menyusun anggaran dan beban biaya setiap tahun dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan investasi dengan mempertimbangkan risiko yang terukur.
2. Pengawasan yang efektif: Dapenpos berupaya melakukan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat jumlah dan tepat tujuan.
3. Transparansi: Dapenpos melakukan transparansi yang tinggi untuk memastikan bahwa peserta dapat memahami bagaimana dana mereka dikelola dengan mengakses informasi melalui website Dapenpos melalui Info Dapenpos yang diterbitkan secara berkala setiap tahun.

Bandung, Maret 2026

**DIREKTUR UTAMA**
IWAN GUNAWAN

A. Lembar Persetujuan

Bandung, Maret 2026


AN. PENGURUS DAPENPOS
DIREKTUR UTAMA

IWAN GUNAWAN


MENGETAHUI,
KETUA DEWAN PENGAWAS DAPENPOS

ASIH KURNIASARI KOMAR